

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan terletak di garis khatulistiwa. Letak geografis Indonesia di garis khatulistiwa, membuat Indonesia menjadi negara tropis yang ditumbuhi oleh hutan hujan tropis yang lebat. Hutan-hutan ini bukan hanya sekedar kumpulan pepohonan, melainkan “paru-paru dunia” yang mengatur siklus karbon global dan menjadi benteng pertahanan utama melawan perubahan iklim. Di antara seluruh gugusan pulau, hutan hujan tropis di Indonesia, Pulau Kalimantan menjadi salah satu tutupan hutan yang masih sangat rapat dan alami. Namun, tutupan lahan hutan di pulau Kalimantan tidak lepas dari ancaman kerusakan, seperti pembalakan liar, alih fungsi lahan, dan kegiatan lain yang membuat ekosistem hutan menjadi rusak.

Sumber daya alam merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kegiatan ekonomi dan pemilihan pekerjaan bagi masyarakat sudah tentu di pengaruhi oleh lingkungan sekitar terutama keberadaan sumber daya alam yang ada, misalnya menjadi petani, nelayan, atau pedagang. Dalam perspektif kebudayaan (Thohir, 2022), pilihan seperti itu dapat dijelaskan ke dalam konsep hidup, pilihan hidup, pemenuhan kebutuhan hidup, dan pemilihan strategi-strategi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi sesuai dengan tingkat-tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh warga masyarakat yang bersangkutan dalam konteks idealisasi sesuai dengan status dan peran yang ingin dijalankan. Secara tradisional, masyarakat di Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat telah hidup dan memanfaatkan hutan secara turun-temurun. Masyarakat memanfaatkan hutan dengan cara mencari kayu untuk bahan bangunan, bahan makanan dan obat seperti buah hutan dan tumbuhan hutan, hewan buruan seperti; tupai, babi hutan, monyet, dan

masih banyak lagi untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Pemanfaatan hutan juga tertuang dalam budaya masyarakat suku Dayak yang berladang dengan cara ladang berpindah, masyarakat membuka sebagian kecil hutan dengan cara ditebang dan dibakar, dikerjakan secara kolektif oleh beberapa orang, penuh pengawasan dan sesuai adat istiadat yang berlaku, sehingga kegiatan berladang menjadi bagian dari budaya dimulai dari menebas, membakar, menanam, dan memanen. Namun seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, pemanfaatan terhadap hutan seringkali sudah melewati batasnya dan menyebabkan perusakan bahkan alih fungsi lahan akibat berubahnya mata pencaharian.

Tantangan besar masyarakat desa saat ini adalah perubahan mata pencaharian, menurut *Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO)* dalam buku *Shifting Cultivation, Livelihood and Food Security New and Old Challenges for Indigenous People in Asia* (2015), menjelaskan bahwa mata pencaharian di masyarakat adat atau desa telah menjadi semakin beragam, sebagian karena keharusan dan sebagian karena pilihan. Kelangkaan lahan adalah salah satu penyebab utama perubahan mata pencaharian saat ini. Studi kasus menunjukkan bahwa integrasi pasar menyebabkan masyarakat memanfaatkan peluang-peluang baru untuk meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Sebelumnya masyarakat sudah cukup menikmati hasil hutan dan perkebunan tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekarang, banyak masyarakat yang ingin mencari untung lebih dengan melakukan tindakan pemanfaatan hutan yang ekstraktif seperti menebang pohon hutan untuk dijual, membuka lahan untuk kebun sawit yang dianggap lebih menguntungkan, atau masuknya pihak luar seperti pengusaha yang ingin berinvestasi perkebunan sawit skala besar.

Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, merupakan salah satu wilayah yang mengalami alih fungsi lahan secara besar-besaran akibat didorongnya lapangan usaha perkebunan sawit. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan kontributor terbesar kedua terhadap

perekonomian Kabupaten Kubu Raya setelah industri pengolahan. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan yang dikutip oleh BPS (2019), produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2018 didominasi oleh kelapa sawit (147.887 ton), kelapa dalam (39.105 ton), dan karet (15.353 ton). Dari total produksi kelapa sawit yang dihasilkan, 80,18 persen merupakan hasil dari perkebunan milik swasta, sisanya berasal dari perkebunan rakyat. Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa sektor perkebunan yang menyumbang pendapatan daerah bagi Kabupaten Kubu Raya dikuasai oleh Perusahaan swasta.

Dominasi penguasaan lahan oleh perusahaan swasta dapat ditemukan lebih dalam terjadi di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan peta penggunaan lahan di Desa Teluk Bakung, terdapat 7 perusahaan pemegang izin konsesi sawit dan 2 perusahaan pemegang izin konsesi pemanfaatan hutan, dengan penggunaan lahan sawit yang tercatat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Teluk Bakung tahun 2020 seluas 14.200 hektare, sedangkan lahan masyarakat hanya seluas 1.040 hektare. Sumber daya manusia yang tercatat sesuai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan, tercatat buruh perkebunan sebanyak 141 orang dan petani sebanyak 705 orang, artinya setiap satu orang petani masing-masing hanya memiliki lahan kurang lebih 1,5 hektar untuk digarap. Terdapat pula masyarakat usia produktif yang tercatat tidak memiliki pekerjaan sebanyak 933 orang.

Untuk menghadapi perusakan dan alih fungsi lahan yang terjadi di wilayah perhutanan. Pemerintah Indonesia menetapkan berbagai kebijakan yang bertujuan mengurangi perusakan dan alih fungsi lahan hutan secara illegal, salah satunya melalui kebijakan perhutanan sosial yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021. Kebijakan ini memberikan akses legal kepada desa melalui Lembaga Desa untuk mengelola sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan, yang dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD). Melalui kebijakan perhutanan sosial, masyarakat yang tinggal di

sekitar hutan mendapatkan akses legal kelola perhutanan dan didorong untuk menjadi pemeran utama dalam meningkatkan kesejahteraan di desa melalui perbaikan ekonomi, menyelesaikan konflik tenurial, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Kebijakan pemerintah melalui perhutanan sosial ini menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian terhadap implementasi kebijakan perhutanan sosial di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Desa Teluk Bakung telah memiliki izin kelola perhutanan sosial dengan skema kelola hutan desa (HD) sejak tahun 2019 yang tertuang dalam Surat Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa Nomor: SK. 10374/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019. Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana skema hutan desa yang sudah berjalan selama hampir tujuh tahun, memberikan manfaat dari program-program yang dihasilkan dan dibentuk dari kebijakan perhutanan sosial, dan dapat berjalan sesuai tujuan mulia perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi perhutanan sosial bagi masyarakat dan lingkungan di Desa Teluk Bakung?
2. Apakah perhutanan sosial berjalan sesuai tujuan mensejahterakan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan di Desa Teluk Bakung?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi perhutanan sosial bagi masyarakat dan lingkungan di Desa Teluk Bakung.

2. Menganalisis manfaat perhutanan sosial sesuai tujuan mensejahterakan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan di Desa Teluk Bakung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang implementasi kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan perhutanan sosial bagi masyarakat yang tinggal di areal hutan desa. Selama ini kebijakan perhutanan sosial kurang dipahami oleh masyarakat, karena kurangnya informasi yang menjelaskan mengenai pengelolaan hutan untuk kesejahteraan namun tetap memperhatikan kelestarian hutan. Serta mencatat program turunan bermanfaat bagi masyarakat yang didapatkan dari akses kelola hutan melalui perhutanan sosial. Penelitian ini juga bertujuan memperluas sudut pandang ilmu pengetahuan tentang pengelolaan hutan yang berkeadilan dan memperkaya kajian yang berkaitan dengan antropologi ekologi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi yang dapat menjadi masukan bagi Pemerintah, lembaga-lembaga yang terkait dengan pembangunan manusia dan wilayah hutan. Khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam menghadapi masalah kemiskinan masyarakat di desa sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu membantu pihak-pihak terkait pembangunan berkelanjutan agar dapat mengimplementasikan program

pembangunan masyarakat melalui pemanfaatan hutan dengan cara lestari.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Dalam rancangan penulisan skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa tulisan terdahulu yang mendukung penulisan skripsi ini. penulis menggunakan beberapa tulisan antropologi yang membahas tentang pengelolaan sumber daya alam lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait.

Jurnal yang ditulis oleh Wisnuyana, Dkk (2023) berjudul “Bagaraksa Alas Mertajati: Ironi Organisasi Pelestarian Danau dan Hutan Adat Dalem Tamblingan”. Jurnal ini berisi tentang dinamika masyarakat Adat Dalem Tamblingan (ADT) yang terdiri dari empat desa yaitu Desa Munduk, Gobleg, Gesing, dan Umajero di Kabupaten Buleleng, Bali. Pada wilayah Adat Dalem Tamblingan, terdapat dua tempat yang sangat dijaga kesucian dan kenaturalannya oleh masyarakat. Dua tempat tersebut yaitu Danau Tamblingan dan Alas (hutan) Mertajati.

Alasan utama kedua tempat tersebut sangat dijaga dan dilindungi karena berkaitan dengan warisan leluhur dan Sejarah awal mula terbentuknya Adat Dalem Tamblingan itu sendiri. Danau Tamblingan dan Hutan Adat Mertajati sendiri memiliki nilai tinggi sebagai kekayaan alam, masih banyak ditemukan pohon-pohon berusia ratusan tahun yang rawan ditebang, pemandangan alam yang indah juga sudah mulai dimanfaatkan untuk tempat wisata alam. Masuknya wisatawan asing maupun lokal yang datang untuk menikmati keindahan Danau Tamblingan dipandang sebagai ancaman oleh masyarakat, khususnya dari desa Gobleg yang

menganggap tempat ini disucikan dan tidak sembarang orang bisa masuk, kecuali untuk aktifitas peribadatan, konservasi, riset, dan edukasi.

Pada tahun 2020 sebuah organisasi Bernama Baga Raksa Alas Mertajati (Brasti) didirikan untuk melestarikan Alas Mertajati dan Danau Tamblingan serta bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya. Namun berdirinya organisasi Brasti dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai pengaburan Sejarah Adat Dalem Tamblingan, selain itu secara adat istiadat masyarakat sudah memiliki kelembagaan secara tradisional untuk menjaga Danau Tamblingan dan Alas Mertajati yang disebut Manega. Munculnya organisasi Brasti menimbulkan dukungan dan penolakan ditengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang mendukung, setuju dengan berdirinya Brasti karena melihat visi dan misinya. Sedangkan masyarakat yang menolak berdirinya Brasti, menolak karena Brasti dianggap memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Manega yang sudah ada sejak ratusan tahun secara turun-temurun. Namun berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Wisnuyana, Dkk (2023), masyarakat melakukan penolakan secara pasif atau tertutup melalui asumsi dan persepsi yang mengarah ke negatif, akibat dari kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai organisasi tersebut. Kemunculan penolakan secara pasif dari masyarakat terjadi akibat kurangnya sosialisasi pembentukan Brasti oleh pemerintah desa dan lembaga yang membantu pembentukannya.

Penulis juga menggunakan buku *The Will to Improve* karya Tania Murray Li (2007) sebagai tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini. Buku ini merupakan karya etnografi historis yang mengkaji "kehendak untuk memperbaiki" (*the will to improve*), yaitu dorongan terus-menerus dari berbagai pihak (Kolonial, Negara, LSM, Lembaga Donor Internasional) untuk mengubah kehidupan masyarakat atas nama pembangunan dan kesejahteraan.

Studi utamanya berpusat di Sulawesi Tengah, Indonesia, khususnya di kawasan pegunungan sekitar Taman Nasional Lore Lindu.

Pada masa Orde Baru (1965-1998), masyarakat tradisional yang tinggal di pedalaman dan perbukitan dianggap sebagai masyarakat terasing atau orang-orang yang terisolasi. Petani bukit pada masa itu dianggap terbelakang. Pemerintah saat itu merasa, keberadaan masyarakat yang dilabeli terasing akan mengurangi citra keberhasilan pembangunan nasional. Sehingga pada saat itu masyarakat terasing dimasukkan ke dalam daftar pengawasan paternalistic Departemen Sosial (Depsos). Tugas Departemen Sosial adalah menormalisasi masyarakat terasing atau disebut dengan program memasyarakatkan.

Inti dari program peradaban Departemen Sosial adalah membangun pemukiman baru dengan cara memindahkan masyarakat yang dianggap terasing menuju wilayah baru yang dianggap sesuai standar Depsos memenuhi kriteria untuk menjadikan masyarakat tidak lagi tertinggal atau terisolasi. Masyarakat yang menjadi sasaran program akan dibimbing dan diawasi oleh petugas lapangan yang bermukim di sana. Tujuan pengawasan ini adalah untuk menanamkan kebiasaan dan rutinitas baru. Sayangnya program Departemen Sosial tidak dirancang untuk bekerja melalui orientasi-orientasi kultural yang sudah ada dalam masyarakat yang menjadi sasaran program, karena tujuannya adalah untuk menggantikan cara berpikir dan kebiasaan yang dianggap terbelakang dengan bentuk-bentuk modern yang terstandarisasi.

Tulisan-tulisan ini sangat membantu penulis untuk memahami tentang implementasi kebijakan, kelola lingkungan, dan pemahaman sudut pandang masyarakat terhadap masuknya sebuah kebijakan. Agar saat penelitian dilakukan, penulis bisa mengumpulkan data-data yang sebenarnya dari implementasi kebijakan perumahan sosial yang berjalan di Desa Teluk Bakung.

1.5.2 Landasan Teori

Teori yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah teori perangkap kemiskinan yang dicetuskan oleh Robert Chambers, teori ini membahas tentang kemiskinan sebagai sebuah jebakan yang mengikat, sehingga akan sangat sulit bagi rumah tangga atau dalam tulisan ini masyarakat desa untuk keluar dari kemiskinan. Chambers menyebutkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh lima faktor yang dapat saling berhubungan dan membentuk rantai yang disebutnya sebagai perangkap kemiskinan. Kelima faktor kemiskinan tersebut dapat dikaitkan satu sama lain dan bisa menghasilkan setidaknya dua puluh pola kemungkinan hubungan kausal yang dalam keadaan negatif membentuk perangkap kemiskinan. Lima faktor tersebut adalah: Kemiskinan, Kelemahan Fisik, Isolasi, Kerentanan, Ketidakberdayaan (Chambers, 1983).

Kemiskinan, merupakan faktor utama yang menjadi dasar terbentuknya perangkap kemiskinan. Faktor ini sangat bergantung pada kepemilikan akan aset atau modal. Kurangnya aset dapat berdampak pada kurangnya kemampuan untuk hidup layak bahkan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan mengakibatkan kelemahan fisik karena kekurangan makanan, kemudian mengakibatkan fisik tidak berkembang dengan baik dan menjadi lemah, kekurangan gizi menjadikan tubuh rentan terhadap infeksi penyakit, kemiskinan kemudian membuat sulit berobat ke klink ataupun dokter karena biaya yang mahal. Kemiskinan membuat orang jadi rentan terhadap keadaan darurat atau kebutuhan mendesak karena tidak memiliki aset.

Kelemahan Fisik dapat menjadi faktor penyebab kemiskinan melalui beberapa cara, produktivitas rendah, ketidakmampuan menggarap lahan yang luas, bekerja lebih lama. Tubuh yang lemah juga dapat diartikan sebagai kurangnya kekuatan seseorang untuk mengikuti kegiatan seperti pelatihan atau pertemuan-pertemuan warga yang bersifat meningkatkan keterampilan atau menambah

pengetahuan bermanfaat, karena sudah lelah bekerja. Terutama bagi kaum wanita yang sehari-sahari waktunya habis mengurus anak dan keluarganya di rumah. Fisik yang lemah membuat seseorang sulit untuk bekerja lebih keras, mencari kegiatan baru, atau bahkan mencari bantuan.

Isolasi dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang membuat seseorang sulit mendapatkan berbagai macam akses akibat dari tempat tinggal yang jauh, tidak terjangkau alat komunikasi, ataupun kurangnya akses Pendidikan. Masyarakat di desa sering kali mengalami masalah isolasi sebagai faktor penyebab kemiskinan. Pembangunan di desa yang belum merata seperti kurangnya sekolah sebagai sarana pendidikan ataupun pembangunan jalan yang masih belum baik menuju desa-desa, menyebabkan masyarakat seringkali terisolasi dari kemampuan untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan keluar dari kemiskinan. Pendidikan yang sulit karena kurangnya sekolah di desa, mengakibatkan masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk menyekolahkan anaknya di kota terdekat. Akses jalan yang kurang baik ke desa juga menghambat perekonomian masyarakat desa, masyarakat yang memiliki kemampuan produksi di desa harus mengeluarkan biaya lebih besar sebagai modal untuk menjual hasil produksinya ke kota.

Kerentanan adalah salah satu faktor pendorong kemiskinan, karena ketidak mampuan seseorang dalam mengelola aset, kemudian terpaksa menjual atau mengadaikan kekayaannya. Kerentanan ini menjadi salah satu faktor yang terjadi karena kaitannya dengan faktor lain, misalnya faktor kelemahan fisik yang membuat seseorang tidak mampu menggarap lahan yang luas, maka orang tersebut akan menjual lahan miliknya yang tidak mampu di garap. Faktor isolasi misalnya, seseorang yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang baik akibat tidak adanya sekolah disekitar tempat tinggalnya, menyebabkan buta huruf dan menurunkan nilai tawarnya dalam mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak.

Ketidak berdayaan menjadi faktor kemiskinan yang sangat terkait dengan faktor perangkap kemiskinan lainnya, salah satu yang sering terjadi adalah pemerasan yang dilakukan oleh kelompok yang lebih kuat. Orang menjadi tidak berdaya, dipengaruhi oleh faktor-faktor sebelumnya, seperti faktor isolasi menyebabkan terbatasnya berbagai akses seperti bantuan pemerintah ataupun hambatan dalam memperoleh bantuan hukum, isolasi dalam bentuk kurangnya pendidikan juga menyebabkan ketidakberdayaan seseorang untuk menuntut upah yang layak. Faktor ini juga bisa dilihat mendorong kelemahan fisik, karena waktu dan tenaga habis dikuras oleh kelompok yang lebih kuat, sehingga mengurangi kesempatan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau mencari pemasukan tambahan.

Teori Perangkap Kemiskinan (*Deprivation Trap*) digunakan pada penelitian ini sebagai dasar untuk mengkaji implementasi kebijakan perhutanan sosial di Desa Teluk Bakung. Apakah kebijakan perhutanan sosial yang memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan, benar-benar memberikan dampak positif yang mampu mengeluarkan masyarakat dari perangkap kemiskinan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mempelajari informasi dengan mengelompokkan data dalam urutan *bottom-up*. Pengelompokkan ini dimulai dari data-data konkret kemudian dijelaskan secara lebih abstrak atau umum. (Abdul Manan, 2021). Proses penelitian kualitatif menyesuaikan

keadaan yang ada di lapangan. Penelitian berfokus pada identifikasi hubungan kompleks antar faktor dan situasi yang terkait.

Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data secara mendalam dan menyeluruh mengenai pokok bahasan, yaitu implementasi perhutanan sosial di Desa Teluk Bakung. Mengumpulkan data-data tentang perhutanan sosial yang idealnya menjadi solusi bagi masyarakat desa dalam memanfaatkan kekayaan alamnya secara berkeadilan dan lestari.

1.6.2 Objek Penelitian dan Sumber Data

Objek penelitian ini adalah dokumen – dokumen yang terkait dengan Implementasi Perhutanan Sosial di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Sumber data yang menjadi pendukung dalam penulisan ini diambil dari sumber website pemerintahan seperti, website GoKUPS yang merupakan sistem informasi terintegrasi milik Kementerian Kehutanan yang meregistrasi seluruh data perhutanan sosial di Indonesia, selain itu sumber data juga diambil dari arsip dan dokumentasi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAMPAN Kalimantan yang telah melakukan pendampingan perhutanan sosial di Desa Teluk Bakung. Desa Teluk Bakung memiliki wilayah administratif seluas 54.641 Hektare, dimana wilayahnya sebagian besar didominasi oleh bukit dan gambut (RPJMDes Tahun 2020-2025).

Jumlah penduduk desa teluk bakung berdasarkan data BPS Kabupaten Kubu Raya tahun 2025 adalah 5.693 jiwa dengan pembagian masing-masing 3.008 laki-laki dan 2.685 perempuan. Desa Teluk Bakung telah memiliki izin kelola perhutanan sosial sejak tahun 2019, sesuai dengan Surat Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa Nomor: SK. 10374/MENLHK-

PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019. Desa ini juga sering mengalami perusakan hutan dan bencana alam yang melibatkan hutan, seperti terjadinya kebakaran lahan yang mengakibatkan banyak dari wilayah hutannya gundul. Penyebab kebakaran ini seringkali merupakan ulah dari masyarakat sendiri yang membakar lahan untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan. Adaptasi dan kesadaran masyarakat Teluk Bakung, melalui akses kelola perhutanan sosial yang didukung oleh Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih jauh tentang sejauh mana perhutanan sosial memberikan dampak bagi masyarakat di Desa Teluk Bakung.

1.6.3 Penentuan Sampel

Pemilihan Sampel menjadi salah satu hal yang penting dalam melakukan penelitian. Pemilihan sampel yang sesuai dengan kebutuhan penelitian sangat penting untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik *purposive sampling* karena teknik ini memilih informan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Tujuan dari pemilihan Teknik ini adalah untuk menjelaskan suatu permasalahan secara jelas karena sample yang dipilih memiliki nilai yang sangat mewakili tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, informasi yang akan dikumpulkan adalah dokumen-dokumen terkait yang mendukung berjalannya program perhutanan sosial di Desa Teluk Bakung, seperti dokumen penetapan Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS), Surat Keputusan Perhutanan Sosial, dokumen pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPHD (AD/ART LPHD), dokumen Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS), dokumen Rencana Kerja Tahunan

LPHD (RKT), pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

1.6.4 Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data dokumen atau studi literatur. Dokumen dapat menyediakan informasi tentang setting yang sedang diteliti, atau tentang konteks yang lebih luas, khususnya mengenai tokoh-tokoh kunci maupun organisasi. Seringkali informasi ini tidak tersedia dari sumber-sumber lain (Hammersley, 2007). Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data berupa dokumen dari pemerintahan yang diakses dari website Kementerian Kehutanan serta kegiatan pendampingan desa khususnya perhutanan sosial yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAMPAN Kalimantan dan dokumen lainnya yang didapatkan dari Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), Desa Teluk Bakung, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

1.6.5 Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan data dokumen dari berbagai sumber arsip yang berkaitan dengan perhutanan sosial dan implementasi perhutanan sosial di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Analisis data yang terkumpul akan dilakukan dengan pendekatan analisis domain. Analisis domain, merupakan pendekatan untuk memperoleh Gambaran umum dan menyeluruh dari objek penelitian. Melalui pertanyaan umum dan pertanyaan rinci peneliti menemukan

berbagai kategori atau domain tertentu sebagai pijakan penelitian (Abdul Manan, 2021).

Setelah data dan dokumen terkumpul, data tersebut kemudian dianalisis sesuai rumusan masalah dan ditunjang dengan teori yang digunakan. Setelah melakukan analisis, penulis membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi paparan yang mengantarkan kepada pokok bahasan skripsi. Bagian ini terdiri dari subbab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian. Pada bab ini akan memuat data, pendapat, dan fakta dari permasalahan yang akan diteliti. Kemudian diberikan alur berpikir dan metode analisis yang akan digunakan untuk meneliti masalah yang terjadi.

BAB 2 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai objek kajian dan tempat penelitian penulisan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini, objek yang menjadi bahan penelitian adalah program perhutanan sosial yang berjalan di Desa Teluk Bakung sejak tahun 2019. Penulisan gambaran umum difokuskan pada masalah atau objek yang dibahas. Tujuan pemaparan ini ialah untuk memberikan gambaran umum secara objektif mengenai program perhutanan sosial yang berjalan di Desa Teluk bakung.

BAB 3 Gambaran Khusus

Bab ini merupakan gambaran khusus objek penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan dan tujuan penelitian dan sudah mulai dengan analisis ringan. Kebijakan pemerintah mengenai perhutanan sosial dan program-program pendukungnya dapat dimasukkan sebagai

bagian dari analisis implementasi kebijakan perhutanan sosial yang berjalan.

BAB 4 Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian. Pada bab ini berisi pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian. Data-data yang didapatkan dari hasil penelitian, dianalisis dan dimuat pada bab ini. Hasil penelitian juga dikaji hubungannya dengan teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB 5 Penutup

Bab penutup berisi kesimpulan dan berisi intisari hasil pembahasan pada bab pendahuluan hingga bagian hasil penelitian. Kesimpulan merupakan temuan-temuan pokok hasil analisis yang menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Penulis juga menambahkan saran terhadap permasalahan yang diteliti, dengan tujuan untuk mendorong dilakukannya penelitian lebih lanjut.